

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI LAMPUNG

Nur Desiana Wardani¹, Dewi Silvia²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

^{1,2}Universitas Mitra Indonesia

¹nurdesianawardani@gmail.com, ²dewisilvia@umitra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang disoroti oleh masyarakat, yaitu terkait dengan masalah akuntabilitas pemerintah yang masih belum transparan, kurang akuntabel, berkinerja buruk serta belum efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis dan Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung secara simultan dan parsial. Penelitian ini termasuk penelitian survei dimana 40 sampel merupakan sampel jenuh dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kinerja berbasis anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai F hitung sebesar $15.603 > F_{tabel} 3,240$ dan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar $0,000 < 0,05$. Secara parsial masing-masing variabel berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Besarnya kontribusi variabel anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 45,8%, sedangkan sisanya 54,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Target Anggaran, Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja

I. PENDAHULUAN

Pada umumnya permintaan para pengguna informasi publik di masa keterbukaan informasi saat ini adalah mendapatkan informasi pertanggung jawaban kinerja badan publik secara lengkap dan transparan terutama atas segala aktivitasnya yang menyangkutkan kepada pendanaan yang asalnya dari APBN atau kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumbangsih dari rakyat atau luar negeri. Kenyataannya yang tampak bahwa kegiatan yang melibatkan anggaran

seringkali menjadi *boomerang* bagi akuntabilitas kinerja karena apabila mendapati pengelolaan keuangan yang buruk ditambah sasaran anggarannya yang tidak tepat, justru efek buruknya bisa mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana diketahui masih menjadi fenomena yang masih disoroti oleh masyarakat.

Pada saat ini, mengetahui bahwasannya telah menempuh tahapan yang baru sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia, bermula dari penggunaan sistem penganggaran tradisional, kini beralih pada penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang

konon dapat mengatasi banyaknya kekurangan dari sistem penganggaran lama karena tidak tersedianya parameter dalam menaksir kinerja dalam menggapai target. Hal ini dilakukan supaya penyaluran anggaran bisa terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, serta menghadirkan pelaporan yang akuntabel, jelas dan lebih mengutamakan kepada tujuan dengan strategi yang terukur dalam menggunakan anggaran.

LPMP Lampung yang memiliki nama panjang dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan satu dari sekian lembaga yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia, didapati telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dalam mencetuskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, LPMP Provinsi Lampung diminta untuk selalu menunaikan perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan belum meningkatnya akuntabilitas kinerja di LPMP Lampung yang sebagaimana diduga sebagai problematika yang masih sering dijumpai selama ini. Adapun penulis berspekulasi bahwa hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya dari anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran yang belum berorientasi pada hasil akhir.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LPMP Lampung tahun 2018 sampai 2019 menerangkan bahwa belum optimalnya akuntabilitas

kinerja ini karena anggaran yang dialokasikan untuk LPMP selama 2 tahun tersebut belum begitu baik, sebab realisasinya yang masih terpaut tipis dari apa yang direncanakan. Ini mengartikan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja belum bisa seutuhnya dipertanggungjawabkan karena belum terealisasi 100%. Apabila diperhatikan untuk realisasi tahun 2018 ini, capaian hanya mencapai 99,35%. Sedangkan di tahun 2019 bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah justru lebih buruk dari sebelumnya karena serapan anggaran hanya mencapai 98,73% atau menurun 0,62% dari tahun yang lalu. Ini artinya penyusunan anggaran di LPMP Provinsi Lampung belum menaati kaidah yang berlaku, dimana belum bisa memanfaatkan dana yang tersedia. Dengan demikian, uraian sebelumnya memberikan makna bahwa program yang dilaksanakan LPMP Lampung belum seutuhnya berhasil. Meskipun dilihat dari persentase kumulatifnya menunjukkan kalau capaian tersebut masuk pada kategori yang telah mendekati tercapai. Namun masih ada beberapa kendala didalam pelaksanaan program, diduga muasalnya dari belum berjalan baiknya penganggaran berlandaskan kinerja dan pemahaman tujuan anggaran, seperti yang diawasi masih adanya pegawai yang belum paham maksud tujuan anggaran ditetapkan.

Dari penguraian diatas, yang menjadi permasalahan pada penelitian yang

dilakukan yaitu apakah ada pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapatnya pengaruh secara parsial dan simultan anggaran beralaskan kinerja dan pemahaman sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lalu harapan lainnya yang dikehendaki dari penelitian ini agar sebagai rekomendasi atau arahan bagi Lembaga pendidikan ini dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan mempermudah pemangku kepentingan dalam penerapan program kegiatan serta mengoptimalkan anggaran yang dijalani supaya tepat sasaran ke masyarakat.

II. KERANGKA TEORITIS

2.1. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja dinyatakan Bastian (2010:202) sebagai teknik anggaran yang menjurus pada produk akhir suatu lembaga, dimana begitu kuat sekali ikatannya terhadap visi, misi dan rencana strategis kelembagaan tersebut. Sedangkan berdasarkan Anggraini dan Puranto (2010:152) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai sistem perancangan, taksiran hitung dan penilaian yang lebih menonjolkan kepada keterkaitan antara anggaran dengan situasi yang diinginkan. Jadi simpulannya

dari anggaran berbasis kinerja yakni suatu sistem penganggaran yang fokusnya lebih cenderung ke pemanfaatan dana yang ada supaya bisa dipergunakan dengan optimal agar hasil yg didapati sesuai kehendak yang direncanakan.

2.2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Definisi kejelasan sasaran anggaran menurut Ginting (2010:143) yaitu seberapa luas maksud anggaran yang sudah dikukuhkan secara jelas juga spesifik, bisa dengan lebih mudah dipahami oleh kelompok bagian yang menanggung keterlaksanaannya tujuan tersebut. Adisaputro dan Anggraini (2010:154) mengungkapkan bahwa kejelasan tujuan anggaran yang spesifik, justru jauh bermanfaat daripada tujuan anggaran yang tidak spesifik. Karena pengaruhnya yang akan membawa dampak kepada para pegawai seperti mana yang akan merasakan bingung dan tertekan. Sementara itu, Kenis (1979) dalam Putra (2013) menuturkan kiranya sasaran anggaran yang bisa dimengerti karena jelas dan spesifik akan mampu menjadi kriteria dalam meraih prestasi yang dipantau dari tujuan anggaran yang telah disahkan. Ketika telah diraihnya pencapaian seperti yang dimau, maka akan memudahkan pihak lembaga dalam mengamanahkan keberhasilan maupun kegagalan dari pengoperasian tugas yang berupa sasaran-sasaran yang telah ditata sebelumnya.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah

Mardiasmo (2009) dalam Halim & Kusufi (2014:16) menyampaikan maksud akuntabilitas sebagai pembagian informasi berupa penyingkapan atas kinerja keuangan pemerintah untuk diutarakan kepada kelompok-kelompok yang memiliki keperluan akan hal tersebut. Dalam hal ini akuntabilitas kinerja dinyatakan oleh Halim (2012:20) sebagai sebuah keharusan yang perlu dilakukan dalam membagikan pertanggungjawaban yang menerangkan kinerja sekaligus aktivitas dari pegawai, pimpinan atau lembaga kepada divisi yang berhak atau berkewajiban untuk membawa informasi dan keterangan terkait sukses tidaknya pengamalan program kegiatan yang disusun.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian survei dalam mendapatkan data dari suatu populasi atau sampel tertentu dengan alat bantu angket untuk pengambilan datanya yang mana berwujud angka (kuantitatif) dari skor nilai dalam setiap daftar pertanyaan yang dianjurkan. Sesuai dengan tingkat eksplanasinya, maka jenis penelitian ini tergolong deskriptif-asosiatif hubungan kausal, karena tidak hanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai pada setiap variabel, namun juga akan diteliti

hubungan pada sifatnya yang sebab akibat, seperti variabel X (yang dipengaruhi) variabel Y (yang mempengaruhi).

Lokasi penelitian ini di suatu lembaga Provinsi Lampung yang bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dengan beralamatkan di Jl. Gatot Subroto Nomor 44A Pahoman, Kota Bandar Lampung

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang terhimpun dalam tim SAKIP serta terlibat dalam proses keuangan, penyusunan *draft* kinerja program, anggaran, serta pelaporan dan evaluasi kinerja di LPMP Lampung yang jumlahnya sebanyak 40 orang. Mengetahui total populasinya sedikit atau tidak sampai 100 orang, maka dipilihnya metode sensus (sampel jenuh) yang berjumlah 40 orang ini, didapati dari seluruh populasi yang tanpa perlu menarik sampel penelitian (Sugiyono, 2015:85).

3.3. Metode Analisis

Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik. Dalam penelitian ini mengukur pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dan uji hipotesis parsial serta simultan. Analisis data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, serta

membuktikan hipotesis penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh output sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.903	7.938		1.374	.178
ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X1)	.317	.133	.296	2.385	.022
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X2)	.491	.111	.548	4.417	.000

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (Y)

Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti 2020

Dari tabel diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y=10.903+0.317X1+0.49X2+e$$

Dari persamaan rumus tersebut, bisa dimaknakan:

- a. Konstanta senilai 10,903 memberi arti bila kedua variabel bebas: anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran dianggap konstan yaitu sama dengan nol (X_1 dan $X_2 = 0$), maka variabel terikatnya yakni akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 10,903.
- b. β_1 atau koefisien regresi dalam variabel bebas pertama atau anggaran berbasis kinerja ini menghasilkan nilai yang positif sebesar 0,317. Ini diartikan bahwa setiap terjadi penambahan 1 satuan, maka akan

disusul dengan penambahan akuntabilitas kinerja sebesar 0,317, sementara untuk asumsi variabel yang lainnya adalah tetap.

c. β_2 yang berarti koefisien regresi X_2 kejelasan sasaran anggaran bernilai 0,491 dengan hasilnya positif, dimana memberi petunjuk bahwa setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran dalam satu satuan, akan disusul bersama naiknya Y akuntabilitas kinerja dengan besar 0,491, selagi variabel yang lainnya diasumsikan tetap.

2. Hasil Uji Simultan(F)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil uji hipotesis simultan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	902.209	2	451.105	15.603	.000 ^b
Residual	1069.691	37	28.911		
Total	1971.900	39			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (Y)

b. Predictors: (Constant), KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X2), ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X1)

Sumber : Data sekunder diolah Peneliti 2020

Pada tabel 4.2, diuraikannya perolehan uji secara bersama-sama yang memiliki besar F.hitung 3,240 > F.tabel 3,240, sementara sig taraf nyata 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan dari kedua variabel independent kepada variabel dependent pemerintah secara bersama-sama (simultan).

3. Hasil Uji Parsial (t)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil uji hipotesis parsial sebagai

berikut :

Tabel 4.3. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	10.903	7.938		
ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X1)	.317	.133	.296	2.385	.022
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X2)	.491	.111	.548	4.417	.000

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (Y)

Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti 2020

Dari hasil *output* SPSS versi 23 seperti pada tabel 4.8 diatas, dijelaskan pengujian secara parsial bahwa hipotesis kedua untuk variabel bebas pertama (X1) terhadap variabel Y memperlihatkan anggaran berbasis kinerja mempunyai thitung 2,385 > t_{tabel} 1,687 serta tingkat signifikan 0,022 < 0,05. Hasilnya ini menggambarkan bahwa H2 dikabulkan, pasalnya anggaran berbasis kinerja memegang pengaruh positif dengan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Selain itu untuk pengujian hipotesis ketiga yaitu variabel bebas kedua (X2) terhadap variabel Y memaparkan kalau kejelasan sasaran anggaran memiliki thitung yang lebih mumpuni dari t_{tabel} (4,417 > 1,687) dan untuk dari sig. nya (0,000 < 0,05), sehingga kesimpulannya hipotesis ketiga bisa diterima dengan mengakui kejelasan sasaran anggaran punya pengaruh positif lagi signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

4. Hasil Uji Koefisiendeterminasi (R²)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil koefisien Determinasi sebagai

berikut :

Tabel 4.4. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	.458	.428	5.377

a. Predictors: (Constant), KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X2), ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X1)

Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti 2020

Berdasarkan tabel yang tertera, diraih nilai koefisien determinasi yang berada pada keterangan R *Square* yaitu sebesar 0,428, memberi arti bahwa besarnya persentase kontribusi pengaruh variabel independen pertama dan kedua terhadap variabel dependen Y yakni 45,8%, sementara kelebihannya 54,2% berasal dari pengaruh aspek lainnya yang tidak dicermati di penelitian ini.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung

Hasil tes simultan (uji F) menerangkan anggaran anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran secara berbarengan memiliki dampak yang pasti dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. Pembuktiannya berasal dari *output*, yaitu F_{hitung} memperoleh nilai positif 15.603 > F_{tabel} 3.240 serta dengan

signifikan $0,000 < 0,05$. Ini bermaksud bahwa setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal ini disebabkan karena penentuan keberhasilan dari akuntabilitas kinerja di LPMP Lampung ini ditentukan oleh penerapan dua hal tersebut yang tengah di implementasikan dengan baik.. Saat kedua sudut pandang tersebut meningkat karena berhasil diimplementasikan dengan maksimal maka akuntabilitas kinerja LPMP Lampung juga akan semakin meningkat, demikian sebaliknya.

Temuan ini sependapat dengan penelitian terdahulu oleh Priatna (2018) yang kesimpulannya adalah jika kenaikan penganggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran yang semakin baik, maka akan menentukan naiknya akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa anggaran yang dibuat telah memenuhi kriteria yang diperlukan sehingga anggaran bisa tersalurkan jelas dan spesifik seperti yang diperlukan dalam lingkup pertanggungjawabannya.

2. Pengaruh Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil telaah dipresentasikan anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LPMP Provinsi Lampung. Pembuktian ini didapat dari hasil

pengujian secara parsial variabel X_1 terhadap Y yang memberi nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($2,385 > 1,687$) serta tingkat signifikan sebesar $0,022 < 0,05$. Artinya sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil kerja yang makin diimplementasi dengan sangat benar, maka juga semakin meningkatkan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, maka makin baiknya penerapan anggaran di LPMP Provinsi Lampung karena dari keberhasilan dalam melaksanakan sistem anggaran terhadap kinerja yang lebih baik sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah. Oleh karena itu sistem anggaran yang berorientasi pada prestasi kerja ini dipercaya menjadi solusi atau alat bagi akuntabilitas kinerja yang diwujudkan melalui beberapa tahapan. Yang mana tahap-tahap unsur anggaran berbasis kinerja ini sangat perlu untuk dimengerti dengan baik dalam setiap perwujudannya oleh seluruh pihak yang terlibat. Beberapa unsur dalam tahapan tersebut meliputi persiapan, ratifikasi, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran. Berhasilnya tujuan anggaran berbasis kinerja ini, saat benar-benar sudah prosedur yang dimaksudkan sebagai unsur tersebut telah benar-benar terwujudkan. Jadi, diperoleh simpulan untuk hipotesis yang diusulkan bisa diterima. Sebab, dilihat dari segi parsial penerapan anggaran berbasis kinerja ada pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Ini dibuktikan bahwasannya akuntabilitas kinerja di LPMP Provinsi Lampung yang dilihat dari sistem anggaran berbasis kinerja ini sudah terlaksanakan baik sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 karena sudah sejalan dengan tujuan (bisa diraih) dan menggambarkan hasil yang berikatan kepada semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Temuan ini konsisten dengan yang dilaksanakan Endrayani (2014), menyebutkan saat anggaran berbasis kinerja dilaksanakan semakin baik, maka akan bertambah naik/tinggi akuntabilitas kinerja.

3. Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berkenaan dengan hasil pengolahan data, ditunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. Perolehan ini sesuai hasil uji t dimana besar thitung variabel kejelasan sasaran anggaran senilai $4,417 > t_{tabel}$ sebesar 1,687 dan besar signifikan yang bernilai $0,000 < 0,05$. Kesimpulan olahan data tersebut, diartikan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja juga semakin meningkat. Sasaran anggaran yang diutarakan secara jelas nantinya akan mempermudah para aparat LPMP Lampung

dalam menjalankan anggaran dan merealisasikan target anggaran seperti yang sudah direncanakan. Selain itu ternyata alasannya lainnya bahwa adanya ketepatan tujuan anggaran ini dalam upaya meningkatkan akuntabilitas serta untuk memperoleh pemahaman akan tujuan yang lebih baik. Sebab itulah, alasan mengapa kejelasan sasaran anggaran sangat diperlukan.

Dalam menunjang AKIP yang baik pada LPMP Lampung, ada beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi supaya menghasilkan kejelasan sasaran anggaran, diantaranya sasaran yang hendak dicapai harus yang jelas atau terjabarkan secara terperinci, perlunya sasaran dirumuskan secara spesifik agar tujuan yang dibuat bisa dicapai, serta juga tujuan yang dibuat selain perlu jelas dan spesifik namun perlu untuk sasaran mudah dimengerti, terarah dan juga terukur. Hal ini memperlihatkan kalau karakter sasaran anggaran secara menyeluruh memberikan efek yang cukup kuat terhadap kinerja pemerintahan dalam agenda pelaksanaan. Melalui semua karakteristik itu, maka keberhasilan pertanggungjawaban kinerja di LPMP Lampung ini diperlihatkan meningkat, salah satunya berasal dari tercapainya kejelasan sasaran anggaran yang baik.

Hasil studi ini sepikiran dengan dilaksanakan Priatna (2018), menjelaskan bahwa tiap penambahan pahamnya tujuan anggaran yang membaik, maka cenderung

akan memengaruhi akuntabilitas kinerja yang juga hendak meningkat

V. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat dipetik dari telaah yang dilakukan yaitu:

1. Anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung.
2. Anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung.
3. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan dan Yunita Anggraini. "Anggaran Bisnis: Analisis Perencanaan dan Pengendalian Laba. Edisi Kedua". Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Anggaraini, Yunita, B. Hendra Puranto. "Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD secara Komprehensif". Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Bastian, Indra. 2010. "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar". Yogyakarta: Erlangga
- Endrayani, Komang Sri dkk. 2014. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)". e-Journal S1 Akuntansi Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Ginting. "Reformasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia". Semarang: Salemba Empat, 2010.
- Halim, Abdul, dkk. "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4". Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. "Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik". Jakarta: Edisi 2, Salemba Empat, 2014.
- Kenis, I. 1979. American Accounting Association: Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performances. The accounting Review, 54 (4), 707-721.
- Komisi Informasi Pusat, "Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penganugerahan Keterbukaan Badan Publik 2019". https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019, pada Mei 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 - 2019. <https://lpmplampung.kemendikbud.go.id>,
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Andi, 2009.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. "Akuntansi Sektor Publik". Jakarta: Edisi 2, Salemba

Empat, 2010.

Priatna, Husaeri dan Ela Nuraisyah. 2018. "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut". Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 9 No. 1. Januari-April 2018, Hal 57-80. ISSN (Online): 2086-4159.

Putra, Deki. 2013. "Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang". Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Sugiyono. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta: